



PARIPURNA DEWAN

AKD Belum Kelar

RAPAT Paripurna Alat Kelengkap Dewan (AKD) Kalimantan Barat masih alot di ruang Balairungsari DPRD Kalbar dari siang hingga petang, Selasa (26/11). Sempat tertunda dan *deadlock* beberapa jam karena komunikasi pimpinan definitif dengan delapan ketua fraksi, akhirnya sidang paripurna berjalan. Di persidangan sejumlah interupsi dilontarkan wakil rakyat terkait susunan badan-badan.

"Ada kelebihan dari fraksi PKB dan fraksi PPP-PKS. Mohon pimpinan koreksi. Apa boleh beberapa badan dirangkap," ungkap Martinus Sudarno, Ketua Fraksi PDI Perjuangan melontarkan interupsinya.

◆ Ke Halaman 7 kolom 5

AKD Belum Kelar

Sambungan dari halaman 1

Selang beberapa lama, Arif Joni Ketua Fraksi PKS+PPP menyebutkan belum melihat apa yang diprotes fraksi PDI Perjuangan ada tata tertib (tatib).

"Tidak ada dalam tatib dilarang. Saya belum melihat di tatib larangan merangkap jabatan di badan tidak diperbolehkan. Mohon pimpinan juga melihat aturan," kata Arif menjawab interupsi Martinus Sudarno.

Prabasa Anantatur, Wakil Ketua DPRD Kalimantan Barat menambahkan bahwa banyaknya jumlah anggota fraksi di komisi IV yakni ada 15 personil. Dalam tatib menyebutkan juga tidak wajib. Seandainya dalam Tatib tidak boleh merangkap, sah-sah saja.

Dilihat apakah nantinya dibahas dalam kesepakatan saja "Lebih enak sesama sepakat saja. Namun kalau nantinya bebas tugas susah karena anggota fraksi merangkap jabatan, lebih bijak tk usah merangkap

saja," tuturnya.

Arif Joni kemudian melanjutkan interupsinya dan menjawab tak setuju. Sebab dalam tatib tidak diatur larangan rangkap jabatan. Kedua kalau ada anggota merangkap karena masalah tambahan honor dan UU meperkenankan sah-sah saja rasanya.

"Soal jadwal kerja bisa diatur. Nah seandainya mengubah lagi, nantinya harus melalui rapat fraksi kembali," tukas dia.

Fraksi PKB+Hanura, Perindo dan PKPI misalnya dengan jumlah anggota Banggar Lima dan Banmus Empat. "Begitu pimpinan. Kita diskusikan saja hari ini (kemarin)," tuturnya.

Suyanto Tanjung mewakili Fraksi PKB meminta pakai aturan main Tatib saja. Sehingga kedepan tidak ada masalah dilanggar dan rentan menjadi temuan BPK. "Terkait honor dan penerimaan tak mungkin bisa sama sama," tukasnya.

Minsen dari Fraksi PDI Perjuangan lalu melontar-

kan interupsinya. "Kenapa bisa dobel jabatan kawan-kawan misalnya dari fraksi PKS+PPP. Saya juga mau supaya tidak ada kecemburuan sosial," ujarnya di hadapan pimpinan seraya menambahkan jumlah anggota dewan di Komisi dan Badan adalah 61.

Ketua DPRD Kalbar M. Keding L meminta dihitung proposional dan profesional saja. "Bisa kacau nantinya. Dasarnya supaya merasa tak ada yang ditinggalkan, terkecuali atau barangkali melalui kesepakatan atau sesuai aturan," ucapnya. "Seandainya masih tarik ulur sebaiknya memang dipending saja," timpalnya.

Arif Joni kemudian menjawab tergantung dengan kawan-kawan di fraksi saja. "Saya hanya menyampaikan peraturan dalam tatib saja. Ada dobel tapi tidak semua fraksi. Sebab diantara fraksi hanya di pilihan di Bapemperda. Saya netral saja. Nah alau ada kesepakatan rapat fraksi kembali ya skor dulu saja," ujarnya. (*den*)